

BAB I

PENDAHULUAN

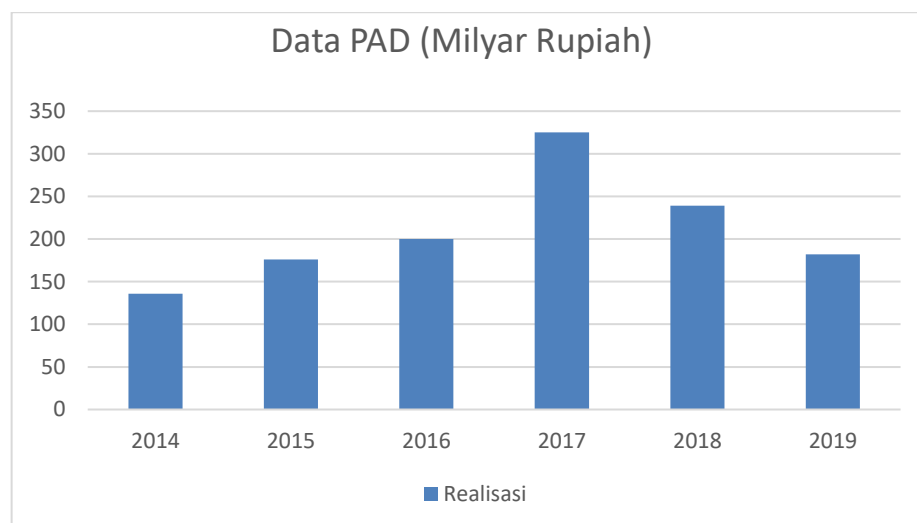
1.1 Latar Belakang

Era otonomi yang dimulai pada tahun 2001 ditandai dengan dibentuknya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia (Affriansyah, 2016). Namun seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (murmaningtyas, 2007).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Permana, 2013). Penyerahan berbagai wewenang ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana Pendapatan

Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian pemerintah Kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah (Hindawati, 2014). Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2002) efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *output* dengan *outcome*. Berikut merupakan data PAD Kabupaten Bangkalan 2014-2019 :



Sumber :Dispenda Kabupaten Bangkalan,2020.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan 2014-2019

Terhitung sejak 2014 pemerintah Kabupaten Bangkalan memilih memberikan wewenang atas segala urusan mengenai pasar kepada Kantor dinas perdagangan (Dindag) sebagai instansi yang khusus menangani segala kebijakan

teknis, perijinan dan pelayanan umum serta pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pasar untuk menciptakan pasar yang memadai, tertib dan aman, sehingga memberi manfaat kepada pedagang, masyarakat umum dan memberikan kontribusi riil kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Fawaidurrohman, 2019). Kabupaten Bangkalan memiliki retribusi yang baik untuk dikembangkan mengingat bahwa Kabupaten Bangkalan sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam (Hindawati, 2014). Sebagian masyarakatnya adalah masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakatnya justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana, dimana pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut.

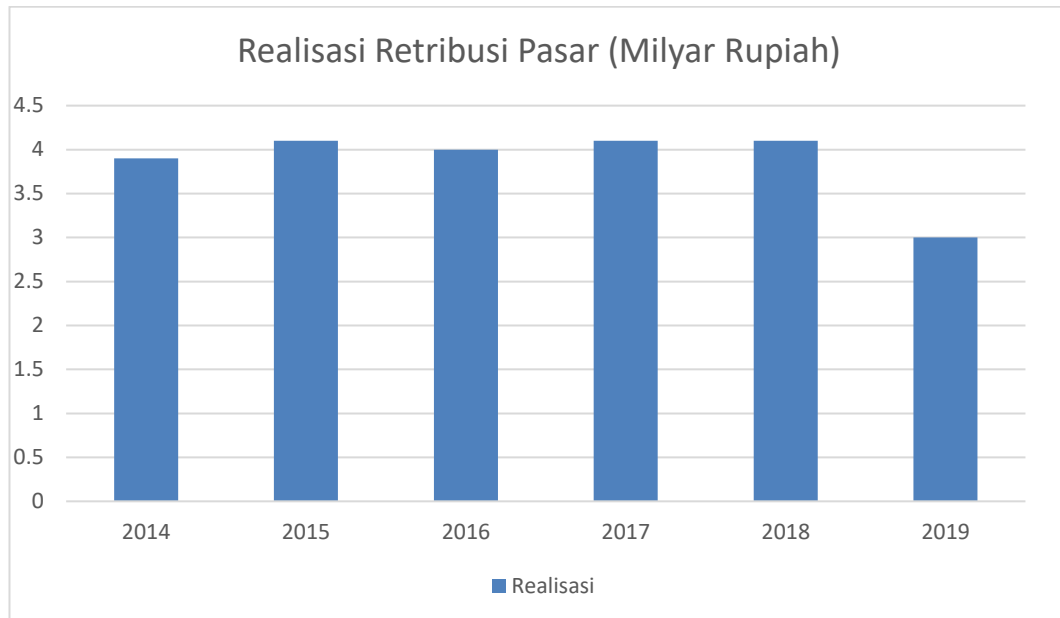
Kabupaten Bangkalan juga mempunyai pasar yang cukup banyak yaitu berjumlah 28 pasar dan tersebar di 18 kecamatan, Hal ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Kantor dinas perdagangan (Dindag), dalam menggali penerimaan daerahnya khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bersumber dari retribusi pasar, dimana pemungutannya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Dalam pemungutan retribusi pasar dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berikut adalah nama-nama pasar di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan :

Tabel 1.1 Nama-nama Pasar di Kabupaten Bangkalan

	Nama Pasar	Kecamatan	No	Nama Pasar	Kecamatan
1	Pasar Klampis	Kecamatan Klampis	15	Pasar Campor	Kecamatan Kwanyar
2	Pasar Blega	Kecamatan Blega	16	Pasar Labang	Kecamatan Labang
3	Pasar Tanah Mera	Kecamatan Tanah Mera	17	Pasar Jaddih	Kecamatan Socah
4	Pasar Kedungdung	Kecamatan Kedungdung	18	Pasar Patemon	Kecamatan Tanah Mera
5	Pasar Modung	Kecamatan Modung	19	Pasar Tanjung Bumi	Kecamatan Tanjung Bumi
6	Pasar Langkap	Kecamatan Burneh	20	Pasar Kamal	Kamal
7	Pasar Duwa' Buter	Kecamatan Modung	21	Pasar Seninan	Kecamatan Bangkalan
8	Pasar Arosbaya	Kecamatan Arosbaya	22	Pasar Dupok	Kecamatan Kokop
9	Pasar Sepulu	Kecamatan Sepulu	23	Pasar Kombangan	Kecamatan Gegger
10	Pasar Sukolilo	Kecamatan Labang	24	Pasar Lomaer	Kecamatan Blega
11	Pasar Socah	Kecamatan Socah	25	Pasar Durjan	Kecamatan Kokop
12	Pasar Ki Lemah Duwur	Kecamatan Bangkalan	26	Pasar Tragah	Kecamatan Tragah
13	Pasar Kwanyar	Kecamatan Kwanyar	27	Pasar Bancaran	Kecamatan Bangkalan
14	Pasar Tona'an	Kecamatan Burneh	28	Pasar Kencur	Kecamatan Socah

Sumber: Dinas Perdagangan Kab.Bangkalan, 2020

Berikut realisasi retribusi pasar di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2019.



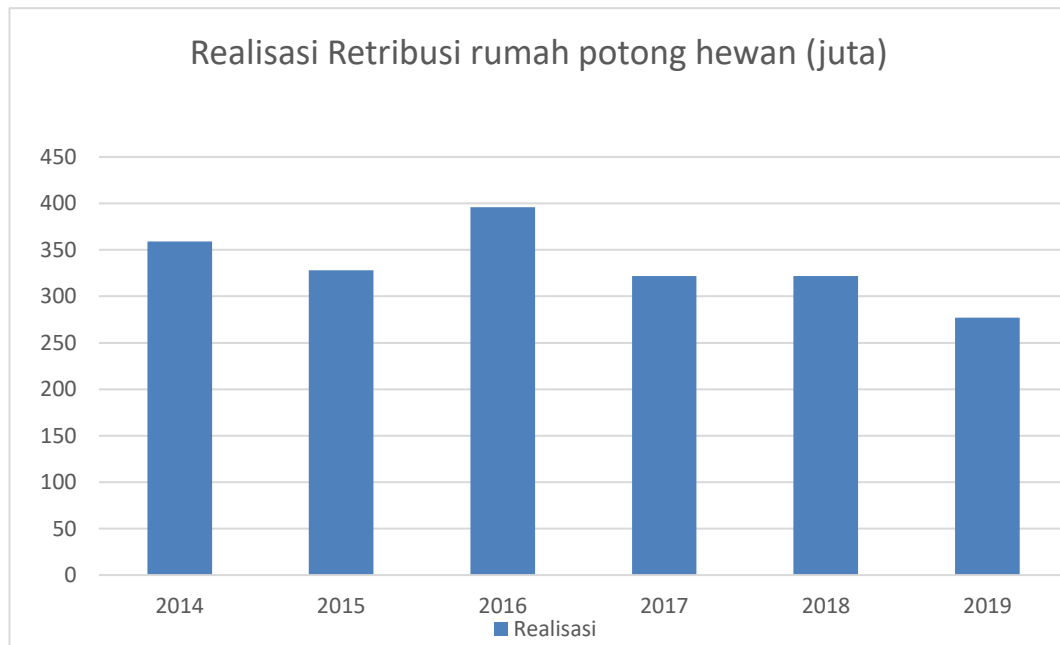
Sumber: Dispenda,2020.

Gambar 1.2 Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2014-2019

Berdasarkan gambar 1.2 tahun 2014-2018 realisasi retribusi pasar relatif stabil rata-rata realisasi retribusi pasar tahun 2014-2018 sebesar RP.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah),Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan drastis ke angka RP.2.948.871.476,00 (Dua milyar Sembilan ratus juta rupiah). Dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam membayar retribusi pasar.

Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, kios, los yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang di kelola oleh perusahaan daerah (putra,2010). Sedangkan retribusi rumah potong hewan adalah pungutan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong yang sudah disediakan

atau dikelola oleh pemerintah daerah. Berikut realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2014-2019.



Sumber: Dinas peternakan 2020

Gambar 1.3 Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2014-2019

Pada tahun 2014 retribusi rumah potong hewan masih tinggi dan terjadi penurunan pada tahun 2015 hal ini dikarenakan harga daging yang naik sehingga realisasi kurang efektif karena banyak sapi yang tidak dipotongkan di rumah potong hewan. Dan terjadi kenaikan pada tahun 2016, realisasi menjadi meningkat karena harga daging kembali menurun dan banyak yang memotongkan sapi di rumah potong hewan. Pada tahun 2017 sampai 2018 terjadi penurunan kembali dan yang paling menurun drastis yaitu pada tahun 2019 terjadinya penurunan ini juga dikarenakan harga sapi meningkat.

Affriansyah (2016) telah meneliti tentang tingkat efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Aceh barat masuk dalam kategori efektif dengan rata-rata tingkat efektifitas 96,11% per tahun. Persamaan dari penelitian ini yaitu metode penelitian

dan variable yang digunakan, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan. Musyarofah dan Agustin (2002) meneliti tentang tingkat efektifitas retribusi pasar di Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya yaitu tingkat efektifitas retribusi pasar dapat dikategorikan efektif karena rata-rata tingkat efektifitasnya sebesar 112%, sehingga hal ini di kategorikan sangat efektif. Persamaan skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dan perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini terjadi beberapa kekurangan yaitu:

- (1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pasar
- (2) Kurangnya pengawasan dalam pemungutan dan kurangnya transparansi pemungutan retribusi pasar
- (3) Kurangnya rumah potong hewan
- (4) Tidak ada peternakan besar dikarenakan sistem ternaknya masih tradisional dan jumlah hewan ternak masih sedikit tiap peternak

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2019 ?
2. Berapakah besar kontribusi retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2019 ?
3. Bagaimana perbandingan antara retribusi pasar dengan retribusi rumah potong hewan 2014 – 2019 di kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efesiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan di Kab.Bangkalan tahun 2014-2019
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan terhadap PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2019
3. Untuk mengetahui Retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten bangkalan tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan dan kontribusinya terhadap PAD.

- **Manfaat Praktis terdiri dari :**

1. **Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal retribusi pasar dan retribusi rumah potong hewan.

2. **Bagi Masyarakat**

Menambah pengetahuan masyarakat luas tentang Kabupaten Bangkalan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori-teori tersebut nantinya akan dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh dan menganalisa permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, data-data yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat, keadaan geografis, karakteristik wilayah, keadaan penduduk, sosial, pemerintahan, dan perekonomian kabupaten Bangkalan yang merupakan tempat penelitian. Bab ini juga menguraikan analisis yang dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dan memberikan hasil dari analisis tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian.